



Keefektivan Kebijakan *E-Learning* berbasis Sosial Media pada PAUD di Masa Pandemi Covid-19

Muhdi¹, Nurkolis ^{✉2}

Manajemen Pendidikan, Universitas PGRI Semarang

DOI: [10.31004/obsesi.v5i1.535](https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.535)

Abstrak

Masalah penelitian ini adalah bagaimanakah keefektivan rumusan kebijakan *e-learning*, keefektivan implementasi kebijakan *e-learning*, dan apa kendala-implementasi *e-learning* di PAUD. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan keefektivan rumusan kebijakan *e-learning*, keefektivan implementasi kebijakan *e-learning*, dan kendala implementasi *e-learning* di PAUD. Penelitian ini adalah penelitian kebijakan dengan metode kombinasi *concurrent embedded strategy*. Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Tengah pada 35 kabupaten/kota, April 2020, responden 1.899 orang dengan *standard error* 5%. Teknik pengumpulan data dengan angket, dokumen kebijakan, dan wawancara. Data kuantitatif diolah dengan Pivoting Program MS Excel. Data kualitatif diolah dengan *software* Nvivo 12+. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Pengujian kredibilitas dokumen dengan korelasi Pearson dan *word frequency*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan kebijakan *e-learning* di PAUD sangat efektif, implementasi kebijakan *e-learning* di PAUD kurang efektif, dan terdapat tiga kendala implementasi *e-learning* di PAUD yaitu kendala pedagogi, teknologi, dan ekonomi.

Kata Kunci: *teknologi; pendidikan; internet; kebijakan; paud.*

Abstract

This research problem is the effectiveness of e-learning policy formulation, the effectiveness of e-learning policy implementation, and the obstacles of e-learning in ECE. The research purpose to describe the effectiveness of e-learning policy formulation, the effectiveness of e-learning policy implementation, and the constraints of e-learning in ECE. This is a policy research combination of concurrent embedded strategy. The study conducted in 35 districts/cities, Central Java Province, April 2020, 1,899 respondents with standard error 5%. Data collection techniques using questionnaires, policy documents, and interviews. Quantitative data processed by MS Excel Pivoting. Qualitative data processed with Nvivo 12+. Data validity testing use source and method triangulation. Testing document credibility with Pearson correlation and word frequency. The results showed that the e-learning policy formulation in ECE very effective, the implementation of e-learning policy in ECE less effective, and there were three obstacles in implementing e-learning in ECE namely pedagogical, technological, and economic constraints.

Keywords: *technology; education; internet; policy, ece.*

Copyright (c) 2020 Muhdi, Nurkolis

✉ Corresponding author :

Email Address : nurkolis@gmail.com (Jl. Sidodadi Timur No. 24 Semarang 50125)

Received 14 May 2020, Accepted 24 May 2020, Published 28 May 2020

PENDAHULUAN

Setelah adanya pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengeluarkan dua kebijakan melalui Surat Edaran No. 3 tahun 2020 (Kemendikbud, 2020c) dan Surat Edaran No. 4 tahun 2020 (Kemendikbud, 2020d). Kedua kebijakan Mendikbud tersebut terkait pencegahan Covid-19 pada satuan pendidikan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19. Kebijakan belajar di rumah itu dikenal sebagai kebijakan belajar jarak jauh dalam jaringan (Daring) atau sering disebut *online learning*. Kementerian agama juga mengeluarkan kebijakan tentang mekanisme pembelajaran dan penilaian madrasah dalam masa darurat pencegahan penyebaran Covid-19 dengan memanfaatkan kanal e-learning (Kemenag, 2020a).

Artikel ini menggunakan istilah *e-learning* yang memiliki konsep yang lebih luas dari pada *online learning*. *E-learning* bisa berbasis computer atau disebut *computer-based learning* dan berbasis *online learning* yaitu pembelajaran dalam jaringan atau disebut Daring. *Online learning* bisa menggunakan internet yang dikenal dengan *internet-based learning* dan bisa berbasis website yang dikenal dengan *web-based learning* yang keduanya menggunakan jaringan *online* yang saling terhubung terus menerus antara satu pengguna dengan pengguna yang lain. Sementara itu gabungan dari *e-learning* dan *face-to-face learning* secara *offline* disebut pembelajaran campuran atau *blended learning* atau *hybrid learning* (Buzzetto-More, 2007:29). Di Amerika Serikat disebut pembelajaran *online* jika memenuhi kriteria minimal 80% isi pembelajaran disampaikan secara *online* atau dalam jaringan. Jika *online* hanya 1-29% maka disebut pembelajaran *web facilitated*. Disebut pembelajaran campuran atau disebut *hybrid learning* jika materi pembelajaran disampaikan secara *online* 30% hingga 80% (Allen dan Seaman, 2013:7).

Maka yang dimaksud dengan *e-learning* dalam artikel ini adalah pembelajaran yang dilakukan tidak secara tatap muka tetapi pembelajaran jarak jauh dengan bantuan perangkat elektronik atau *gadget* seperti *desktop*, *laptop*, atau *smart phone* yang dimiliki oleh guru dan siswa/orang tua siswa sehingga proses pembelajaran tetap berlangsung dalam situasi pandemi Covid-19.

Dipilihnya istilah *e-learning* ini karena pada masa pandemi Covid-19 ini kenyataannya proses pembelajaran di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak dilaksanakan terus menerus di dalam jaringan tapi tidaksakanan secara *on* dan *off*. Namun pembelajaran juga tidak dapat dilakukan secara tatap muka dikarenakan adanya larangan mengumpulkan siswa dengan alasan keamanan. *E-learning* di PAUD berbasis sosial media karena 95% pelaksanaan pembelajaran menggunakan media sosial berupa WhatsApp.

Seiring berkembangnya teknologi & informasi dan internet, maka pembelajaran dapat dilakukan secara *online*. Maka muncullah banyak istilah seperti *e-learning* yaitu pembelajaran yang menggunakan perangkat elektronik. Pembelajaran yang dilaksanakan dengan jaringan internet atau dengan *world wide web* disebut *online learning* atau *online education*. Pendidikan *online* menghubungkan siswa dengan materi pelajaran melalui internet (Johnson dan Manning, 2009:10). Ada yang menyebut pendidikan *online* sebagai pendidikan siber atau *cyberspace classroom* (Palloff dan Pratt, 2002:20). Kini ada yang memanfaatkan *smart phone* sebagai sarana pembelajaran maka disebut *m-learning* atau pembelajaran bergerak (*mobile learning*) karena guru dan siswa bisa bergerak kemanapun mereka berada.

Surat Edaran Mendikbud No. 3 dan 4 tersebut merupakan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan (Tilaar dan Nugroho, 2009:264). Kebijakan pendidikan adalah alat yang dibuat oleh pemerintah demi terwujudnya perubahan yang lebih baik (Madjid, 2018:12-13). Kebijakan ini dikeluarkan karena kebijakan penyelenggaraan pendidikan *face to face* tidak bisa dilaksanakan sehingga perlu dibuat kebijakan baru dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Dua kebijakan Mendikbud tersebut menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait penanganan Covid-19 merupakan kebijakan publik bidang pendidikan. Kebijakan publik memiliki tujuan yaitu distributif

versus absortif, regulatif versus deregulatif, serta dinamisasi versus stabilitasi (Nugroho, 2017:172). Kebijakan pendidikan memiliki tiga unsur pokok yaitu adanya masalah, adanya tujuan, dan adanya cara pemecahan masalah (Madjid, 2018: 16-21).

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan *e-learning* adalah perencanaan, pengukuran kebutuhan siswa, sistem pendukung, kompetensi pengajar, desain materi, *platform* yang tepat, dan evaluasi hasil belajar siswa (Lynch, 2002:3-4). Ahli lain berpendapat aspek yang diperhatikan dalam *e-learning* adalah siswa, guru, materi pembelajaran, teknologi atau *platform* yang digunakan, dan lingkungan pembelajaran (Inoue, 2007:67). *Platform* dalam sistem *e-learning* yaitu *learning management system* (LMS) merupakan pembentuk lingkungan belajar *virtual* (Coates, 2006:43). Tiga aspek utama dalam *e-learning* yaitu pengembang, pendidik, dan siswa (Pangondian dkk., 2019). *E-learning* akan berhasil jika memperhatikan akses dan teknologi, pedoman dan prosedur, partisipasi maksimum dari siswa, pembelajaran kolaboratif yang diterapkan guru, dan adanya interaksi (Palloff dan Pratt, 2002:26). Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka kebijakan dan implementasi *e-learning* sebaiknya memperhatikan aspek siswa, guru, sarana pendukung, materi, evaluasi, interaksi, *platform* teknologi yang digunakan, dan sistem manajemen pembelajaran.

Beberapa hasil penelitian terkait penerapan *e-learning* dengan berbagai istilah yang digunakan di PAUD menunjukkan hasil dan dampak positif terhadap siswa. Seperti ditulis oleh (Asilestari, 2016; Setyaji dkk., 2015; Panjaitan dkk., 2015; dan Taufik dkk., 2019). Namun penelitian-penelitian tersebut dalam skala kecil dan dengan jumlah responden sedikit. Sementara itu penelitian ini bereskala besar yaitu tingkat provinsi dengan jumlah responden yang jauh lebih banyak. Implementasi kebijakan *e-learning* masa Covid-19 sedang berlangsung dan belum ada hasil penelitian yang mengungkap keefektivan rumusan kebijakan, keefektivan implementasi kebijakan, dan kendala-kendalanya. Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan karena akan diperoleh hal-hal yang baru dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk menyempurnakan kebijakan khususnya terkait *e-learning* di PAUD.

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (a) bagaimanakah keefektivan rumusan kebijakan *e-learning* di PAUD, (b) bagaimanakah keefektivan implementasi kebijakan *e-learning* di PAUD, dan (c) apakah kendala-kendala implementasi *e-learning* di PAUD? Maka tujuan penelitian ini yaitu untuk (a) mendeskripsikan keefektivan rumusan kebijakan *e-learning* di PAUD, (b) mendeskripsikan keefektivan implementasi kebijakan *e-learning* di PAUD, dan (c) mendeskripsikan kendala-kendala implementasi *e-learning* di PAUD.

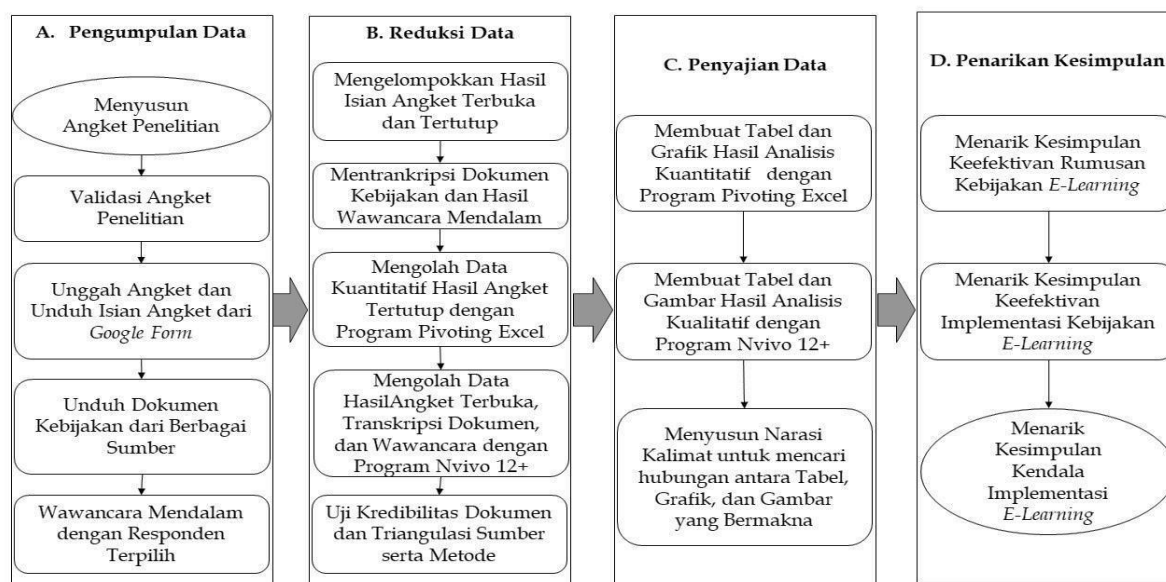
Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh guru dan kepala PAUD dalam mengimplementasi kebijakan *e-learning*, sebagai masukan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memperbaiki kebijakan *e-learning*, dan memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten & Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten & Kota dalam mengendalikan dan mengawasi implementasi *e-learning* di PAUD.

METODOLOGI

Artikel ini berdasarkan hasil penelitian kebijakan dengan metode kombinasi *concurrent embedded strategy*. Penelitian kebijakan adalah penelitian yang objeknya berupa kebijakan terdiri penelitian tentang kebijakan dan penelitian untuk kebijakan (Nugroho, 2014:54). Penelitian ini termasuk penelitian kebijakan jenis “penelitian tentang kebijakan” karena kebijakan yang diteliti sudah ada yaitu kebijakan belajar di rumah dengan *online learning* atau *e-learning*. Metode kombinasi *concurrent embedded strategy* menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara simultan tetapi bobot metodenya berbeda (Sugiyono, 2017:431). Dipilih metode kombinasi *concurrent embedded strategy* karena bobot metodenya tidak sama. Dari tiga subfokus penelitian, dua diantaranya dianalisis secara kualitatif dan satu dianalisis dengan kuantitatif.

Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Tengah pada 35 kabupaten dan kota dengan responden 1.899 orang guru PAUD dengan *standard error* 5%. Rinciannya 519 orang guru PAUD di bawah Kementerian Agama (Kemenag) dan 1.380 orang guru PAUD di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Teknik pengumpulan data dengan angket tertutup dan terbuka yang diedarkan pada bulan April 2020 melalui *google form* yang tautannya disebarakan melalui grup WhatsApp para guru. Dokumen kebijakan yang dianalisis sebanyak 23 mencakup dokumen Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Data dilengkapi dengan wawancara mendalam melalui aplikasi *voice* di WhatsApp. Sebanyak 23 dokumen tertulis yang digunakan untuk analisis kebijakan terdiri dari 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), 1 Peraturan Pemerintah, 1 Keputusan Presiden, 4 kebijakan tingkat Kementerian, 2 kebijakan tingkat Provinsi, dan 14 adalah kebijakan tingkat Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Data kuantitatif berupa isian angket tertutup diolah dengan Pivoting di Program MS Excel. Data kualitatif berupa isian angket terbuka, dokumen, dan hasil wawancara diolah dengan *software* kuantitatif-kualitatif Nvivo 12+. Analisis data kualitatif mengikuti model Miles dan Huberman seperti gambar 1. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dengan mengecek jawaban dari responden berdasarkan isian angket terbuka dan hasil wawancara. Triangulasi metode dengan mengecek jawab responden dari angket, wawancara, dan penelusuran dokumen.



Gambar 1. Langkah-Langkah Penelitian

Kredibilitas dokumen diolah dengan korelasi Pearson hasilnya menunjukkan bahwa dari 23 dokumen tersebut saling terkait satu dengan yang lain. Dengan *software* Nvivo 12+ diketahui bahwa nilai korelasi terendah adalah 0,14 dan nilai korelasi tertinggi adalah 0,99. Kredibilitas dokumen juga dicek dengan fasilitas *word frequency* untuk mengetahui apakah dokumen yang dianalisis sesuai dengan topik dan tujuan penelitian. Hasilnya kata-kata kunci tertinggi yang ditemukan adalah “pendidikan” ada 346 kata, “sekolah” ada 151 kata, “kelembagaan” 112 kata, dan “kebijakan” ada 87 kata yang selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2. Dengan demikian semua dokumen yang dianalisis saling terkait dan memiliki kredibilitas sesuai dengan permasalahan penelitian.

Unsur dan Tujuan	Deskripsi Rumusan Kebijakan <i>E-Learning</i>
Cara Pemecahan Masalah (Madjid, 2018).	Pembelajaran dilaksanakan dari rumah dengan <i>e-learning</i> , mengatur ulang penggunaan dana bantuan operasional sekolah, mengatur ulang pelaksanaan ujian sekolah, membatalkan ujian nasional, mengatur ulang kenaikan kelas dan penerimaan peserta didik baru, memaksimalkan pemanfaatan UKS, menyediakan sarana kesehatan untuk cuci tangan, dan menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekolah.
Ciri Kebijakan yang Baik (Sugiyono, 2017).	Memiliki tujuan dan tujuan kebijakan jelas, memiliki cara pemecahan masalah, dibuat secara adil karena berlaku di seluruh wilayah Indonesia, bersifat terbuka dan fleksibel karena boleh menggunakan <i>platform</i> atau aplikasi yang berbeda.

Masalah utama munculnya kebijakan *e-learning* adalah kekhawatiran berkembang dan menyebarnya Covid-19 di lingkungan satuan pendidikan karena virus ini sudah berkembang dan menyebar di masyarakat. Dengan demikian kebijakan ini sudah memenuhi unsur masalah (Madjid, 2018:17). Kebijakan ini telah memenuhi rumusan masalah yang jelas dan ilmiah yaitu berdasarkan data yang lengkap, akurat, dan *up to date* (Sugiyono, 2017:6) karena kebijakan tersebut dikeluarkan setelah mencermati terus bertambahnya penderita Covid-19 di masyarakat dan memperhatikan ketersediaan akses internet di sekolah dan madrasah. Tujuan kebijakan *e-learning* adalah untuk melindungi kesehatan warga sekolah dan madrasah dari ancaman Covid-19 dan menjamin keberlangsungan pembelajaran secara *e-learning*. Dengan demikian ketiga kebijakan tersebut telah memiliki unsur tujuan (Madjid, 2018:19) atau telah memenuhi kebijakan yang baik (Sugiyono, 2017:6) karena kebijakan ini memiliki tujuan dan tujuannya jelas.

Cara pemecahan masalah terkait Covid-19 di satuan pendidikan tertuang dalam SE Mendikbud No. 3 tahun 2020 yaitu “proses pembelajaran dilaksanakan dari rumah dengan *e-learning*”, “mengatur ulang penggunaan dana bantuan operasional sekolah”, “mengatur ulang pelaksanaan ujian sekolah”, “membatalkan ujian nasional”, “mengatur ulang kenaikan kelas dan penerimaan peserta didik baru”, “memaksimalkan pemanfaatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)”, “menyediakan sarana kesehatan untuk cuci tangan”, serta “menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekolah”. Dengan demikian kebijakan ini telah memenuhi unsur pemecahan masalah (Madjid, 2018;20). Ketiga kebijakan tersebut telah memenuhi kebijakan yang baik karena telah menyediakan cara pemecahan masalah (Sugiyono, 2017:6).

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dan Kemenag tersebut telah dibuat secara adil karena dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan ini juga bersifat terbuka dan fleksibel karena warga sekolah dan madrasah bisa menggunakan berbagai *platform* pembelajaran jarak jauh baik yang disediakan langsung oleh kedua kementerian tersebut atau melalui kanal dan penyedia layanan lainnya. Misalnya dalam Nota Dinas Dirjen Pendaik Kemenag disebutkan bahwa madrasah dapat menyelenggarakan belajar dari rumah dengan memanfaatkan aplikasi *e-learning* madrasah melalui <https://elearning.kemendikbud.go.id/web> dan atau aplikasi daring lainnya. Dengan demikian kebijakan *e-learning* ini memenuhi kebijakan yang baik (Sugiyono, 2017:6).

Ditinjau dari sisi tujuan kebijakan *e-learning* yang tertuang dalam SE Mendikbud No. 4 tahun 2020 (Kemendikbud, 2020d) dan Surat Dirjen Pendaik Kemenag (Kemenag, 2020a) telah memenuhi tujuan kebijakan regulatif sekaligus deregulatif. Kebijakan regulatif bersifat mengatur dan membatasi maka dalam konteks kebijakan *e-learning* ini mengatur agar kegiatan pembelajaran dilaksanakan dari rumah dengan *e-learning* (Nugroho, 2017:172). Kebijakan ini juga mengatur bahwa pembelajaran di rumah dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar bermakna bagi siswa, dan difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup diantaranya mengenai Covid-19. Kebijakan ini juga bersifat deregulatif karena dinyatakan bahwa *e-learning* “tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian

kurikulum dalam rangka kenaikan kelas maupun kelulusan". Kebijakan ini melonggarkan aturan yang dinyatakan "tugas dan aktivitas belajar di rumah dapat bervariasi antarsiswa sesuai minat masing-masing siswa". Para guru diminta memberi umpan balik kepada siswa secara kualitatif tanpa diharuskan memberi skor kuantitatif hasil belajar siswa.

Kebijakan yang telah memenuhi tujuan regulatif juga ditunjukkan dalam SE Mendikbud No. 3 tahun 2020 (Kemendikbud, 2020c). Tujuan regulatif terlihat dari kalimat "menginstruksikan kepada satuan pendidikan untuk mengoptimalkan peran usaha kesehatan sekolah", "memastikan ketersediaan sarana cuci tangan pakai sabun", dan "memastikan kebersihan ruangan". Kebijakan juga memiliki tujuan deregulatif yang tampak dalam kalimat "memberikan ijin kepada warga satuan pendidikan yang sakit untuk tidak datang di satuan pendidikan", "tidak memberlakukan hukuman bagi yang tidak masuk karena sakit", dan "tidak memberlakukan kebijakan berdasar insentif berbasis kehadiran". Tujuan deregulatif dari Nota Dinas Dirjen Pendais Kemenag juga tampak dalam penyataannya kebijakan terkait ujian akhir madrasah, ujian akhir semester, dan penerimaan peserta didik baru.

Kebijakan Kemendikbud dan Kemenag tersebut juga telah memenuhi tujuan mendinamisasi atau menstabilisasi. Kebijakan mendinamisasi bersifat menggerakkan sumber daya untuk mencapai kemajuan yang dikehendaki (Nugroho, 2017:172). Hal ini terlihat dari jawaban responden yang menunjukkan 82% guru PAUD mengaku bahwa pandemi Covid-19 ini telah memotivasi mereka untuk belajar menggunakan *e-learning* dan hanya 18% saja yang menyatakan tidak termotivasi. Kebijakan tersebut telah menggerakkan guru untuk belajar menguasai teknologi pembelajaran atau teknologi pendidikan. Beberapa data kuantitatif dirangkum pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Pemahaman dan Implementasi E-Learning di PAUD

Deskripsi Pertanyaan	Alternatif Jawaban 1 Buah	
	Ya (%)	Tidak (%)
1. Apakah guru tahu kebijakan <i>e-learning</i> ?	90	10
2. Apakah guru tahu kebijakan <i>e-learning</i> dari pemerintah berupa surat edaran?	73	27
3. Apakah guru menerapkan kebijakan <i>e-learning</i> ?	95	5
4. Apakah guru berpengalaman menerapkan <i>e-learning</i> ?	19	81
5. Apakah guru membuat RPP?	83	17
6. Apakah pandemi Covid-19 memotivasi guru untuk belajar <i>e-learning</i> ?	82	18

Hasil wawancara menunjukkan bahwa belum ada guru PAUD yang pernah mendapatkan pelatihan *e-learning* dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) atau Kemenag. Kondisi pandemi Covid-19 memaksa para guru melaksanakan *e-learning* karena tidak ada pilihan lain setelah keluarnya kebijakan mengumpulkan masyarakat dan menjaga jarak fisik. Berdasarkan angket terkait pengalaman guru PAUD dalam melaksanakan *e-learning* sebanyak 81% guru belum pernah menerapkan *e-learning*, yang kadang-kadang menerapkan 13% dan yang sering menerapkan sebanyak 6%. Kemungkinan mereka yang pernah menerapkan *e-learning* karena pengalamannya saat kuliah atau belajar secara mandiri.

Pengakuan responden tersebut sesuai dengan data Kemenag bahwa hanya 1% saja siswa yang telah menggunakan *e-learning* dan sebanyak 22% guru di lingkungan Kemenag telah menggunakan *e-learning*, serta 14% lembaga madrasah telah menggunakan *e-learning* (Kemenag, 2020b). Detail datanya adalah jumlah total madrasah 82.418 namun lembaga pengguna *e-learning* 11.289. Jumlah guru madrasah keseluruhan 268.706 orang sedangkan guru pengguna *e-learning* 59.615 orang. Dilihat dari jumlah siswa madrasah keseluruhan 9.45.198 orang sedangkan jumlah siswa pengguna *e-learning* 60.401 orang (Kemenag, 2020c).

Keefektifan rumusan kebijakan *e-learning* selain ditinjau dari ketiga teori kebijakan tersebut juga bisa dilihat dari pemahaman para pelaksana dan tingkat implementasinya. Sebanyak 90% guru PAUD mengaku tahu adanya kebijakan *e-learning* dan 10% guru tidak tahu. Sebesar 72% guru mengetahui kebijakan tersebut dari kebijakam Kemendikbud dan Kemenag berupa Surat Edaran dan sisanya dari kebijakan yang lain. Berdasarkan data yang menerapkan *e-learning* sebanyak 95% dan yang tidak menerapkan hanya 5%. Artinya para guru telah mengetahui adanya kebijakan, mengerti isinya, dan melaksanakan kebijakan tersebut.

Berdasarkan analisis terhadap 23 dokumen menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama Provinsi, serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota saling mendukung kebijakan *e-learning* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya hasil Korelasi Pearson dengan nilai korelasi terendah 0,14 dan nilai korelasi tertinggi 0,99. Temuan ini berbeda dengan temuan Kemendikbud yang menunjukkan 38% sekolah mengaku tidak mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah (Kemendikbud, 2020a: 10). Survey ditingkat guru dilaporkan Federasai Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyatakan 40,2% guru mengaku tidak mendapatkan bantuan dari sekolah untuk menerapkan pembelajaran di rumah (KPAI, 2020a). Perbedaan ini terjadi karena kemungkinan para guru yang disurvei Kemendikbud dan KPAI tersebut tidak membaca dan mencermati ini berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan instansi terkait.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan kebijakan *e-learning* sudah sangat efektif. Secara teoretis unsur kebijakan sudah terpenuhi, tujuan kebijakan sudah ada dan jelas, serta memenuhi kriteria kebijakan yang baik.

Keefektifan Implementasi Kebijakan E-Learning di PAUD

Sejak tahun 1980 hingga kini telah berkembang teknologi internet, multimedia interaktif, *MOOCs*, *Social Computing*, dan *Cloud Computing* (Huang dkk., 2019:43-44) yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. Teori belajar konstruktivisme telah digeser oleh teori konektivisme dan teknologi pendidikan telah berkembang menjadi lebih interaktif sehingga menuntut perubahan dalam praktik pembelajaran di kelas. Saat ini dikenal sebagai era *internet of things* (IoT). IoT adalah jaringan yang menghubungkan berbagai elemen dengan kecerdasan perangkat lunak, sensor, dan konektivitas melalui internet (Rayes dan Salam, 2019:2). Sayangnya para guru di Indonesia belum banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta internet dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari prosentase guru yang menggunakan fasilitas *e-learning* di Kemdikbud melalui kanal rumah belajar hanya 9% dan di Kemenag 22% (Kemenag, 2020b), sementara itu dilihat dari prosesntasi siswa baik di Kemendikbud dan Kemenag sama-sama 1%.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan, bagaimanakah keefektifan implementasi *e-learning* di PAUD pada masa pandemic Covid-19 ini? Untuk mengetahuinya maka perlu dibahas dari berbagai sisi seperti kesiapan guru, media yang digunakan, *platform* teknologi yang digunakan, metode yang dipilih dalam pembelajaran, dan evaluasi yang diterapkan oleh para guru.

Berdasarkan pengalaman guru PAUD sebanyak 81% belum pernah menerapkan *e-learning* dan mereka juga belum pernah mendapatkan pelatihan *e-learning*. Karena tidak ada pilihan lain pada Covid-19 ini maka 95% guru telah menerapkan *e-learning* dan hanya 5% yang tidak menerapkannya. Namun ketika guru PAUD diminta untuk menilai kualitas pelaksanaan *e-learning* yang mereka lakukan hasilnya menunjukkan sebanyak 51% guru menilai "cukup".

Berdasarkan jawaban responden guru PAUD sebanyak 83% guru sudah membuat RPP dan 13% lainnya belum membuat RPP. Mencermati pengalaman pembelajaran dan pelatihan *e-learning* yang dimiliki guru maka RPP yang dibuat bukanlah untuk kegiatan *e-*

learning. Perbedaan mendasar pembelajaran tatap muka dengan membelajarkan elektronik adalah dalam hal interaksi pembelajaran. Oleh karena itu RPP yang dibuat guru dalam *e-learning* harus secara khusus memperhatikan aspek interaksi selama pembelajaran.

Pilihan media pembelajaran, *platform* yang digunakan, metode pembelajaran, dan evaluasi yang digunakan oleh guru PAUD saat menerapkan *e-learning* di masa pandemi Covid-19 dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Penerapan E-Learning oleh Guru PAUD

Deskripsi Pertanyaan	Alternatif Jawaban Lebih dari 1	
	Terbanyak 1 (%)	Terbanyak 2 (%)
1. Media ang digunakan guru dalam menerapkan <i>e-leaning</i> ?	63-audio visual	29-visual
2. <i>Platform e-learning</i> yang digunakan guru?	95-whatsapp	20-google class
3. Metode yang dugunakan guru dalam <i>e-earning</i> ?	96-penugasan	39-tanya jawab
4. Evaluasi yang digunakan guru dalam menerapkan <i>e-learning</i> ?	61-tertulis	44-portofolio
5. Penilaian guru terhadap penyelenggaraan <i>e-learning</i> ?	51-cukup baik	33-baik

Ditinjau dari media yang digunakan guru dalam implementasi *e-learning*, sebagian besar responden memanfaatkan media audio visual untuk menyampaikan pesan dan menerima pesan ke siswa yaitu 63%. Guru yang memanfaatkan media visual 29%, dan teks 5%, serta audio 3%. Kenyataan tersebut sangat berbeda dengan pernyataan pilihan *platform* yang digunakan guru dalam pembelajaran. Pengakuan 95% guru responden menggunakan aplikasi WhatsApp dan khalayak mengetahui bahwa aplikasi ini termasuk aplikasi yang banyak menggunakan teks. Audio visual di WhatsApp juga ada walau penggunaannya tidak maksimal untuk pembelajaran yang interaktif. Hasil penelitian ini senada dengan temuan KPAI dan FSGI yang menyatakan bahwa 83,4% guru menggunakan medsos (WhatsApp, Line, Facebook, dan Instagram) dalam pembelajaran di rumah secara *e-learning* (KPAI, 2020b).

Temuan Kemendikbud juga menyatakan bahwa WhatsApp paling banyak digunakan oleh para guru yaitu sebesar 42%, *platform* kelas maya 16%, telepon atau sms 17%, dan *video conference* 11%, serta sisanya menggunakan email, aplikasi *google form*, dan mengunjungi langsung siswa ke rumah-rumah (Kemendikbud, 2020a: 13). Temuan penelitian ini dan temuan Kemendikbud mirip dengan temuan KPAI bahwa komunikasi guru murid dilakukan menggunakan aplikasi pesan singkat sebesar 87,2%, zoom meeting sebesar 20,2%, video call WhatsApp sebesar 7,6%, dan telepon sebesar 5,2% (CNN Indonesia, 2020).

Media yang digunakan dan *platform* teknologi yang dipilih berbasis teks tersebut tidak memungkinkan terjadi interaksi intensif. Padahal terdapat tiga tingkatan interaksi siswa dalam *e-learning* yaitu interaksi dengan konsep, interaksi dengan tugas, dan interaksi dengan orang lain yaitu dengan guru maupun siswa lain (Palloff dan Pratt, 2002:26; dan Juwah, 2006:10). Interaksi siswa dengan konsep adalah kontak siswa dengan konseptualisasi orang lain. Interaksi terjadi antara kerangka pemahaman siswa atas mareti selumnya dengan materi baru serta dengan pemahaman siswa lainnya. Interaksi dengan tugas adalah aplikasi konsep baru yang telah dipahami siswa dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan guru secara bermakna. Interaksi dengan orang lain akan penguji penguasaan konsep baru dengan cara melakukan komunikasi dengan teman-temannya dan guru selama mengerjakan tugas yang dikerjakan.

Dengan media teks jarak jauh melalui WhatsApp tersebut tidak memungkinkan adanya interaksi yang intensif antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa lainnya. Interaksi dengan konsep yang ada di materi pun akhirnya akan terhambat sehingga akan

banyak kendala dalam menyelesaikan tugas. Selama implementasi *e-learning* di Indonesia disimpulkan oleh Kemendikbud bahwa belum banyak guru menerapkan pembelajaran yang interaktif (Kemendikbud, 2020a:24). Survey KPAI dan FSGI juga menyimpulkan bahwa 79,9% siswa merasakan tidak ada interaksi yang intensif antara guru dan siswa. Pada guru tidak menjelaskan materi atau tidak adanya tanya jawab antara guru dan siswa. Para guru hanya memberikan tugas dan setelah itu para guru menagih tugas kepada para siswa (KPAI, 2020b).

Proses interaksi akan terjadi secara maksimal jika media yang dipilihnya tepat. Jika kondisinya memungkinkan, media audio visual paling berpeluang terjadi interaksi secara maksimal. Sedangkan media audio atau teks saja kurang memberi peluang terjadinya interaksi secara optimal. Misalnya media audio visual berupa komputer interaktif atau CD interaktif akan mengoptimalkan motorik anak menjadi lebih peka dan terasah (Asilestari, 2016). Interaksi yang baik dalam pembelajaran digital dan adanya kepercayaan diri siswa akan berdampak positif terhadap hasil belajar (Panjaitan dkk., 2020). Aspek interaksi ini harus benar-benar diperhatikan karena terkait dengan tingkat kegagalan *e-learning* yang berada pada kisaran 20-80%. Studi lain menyimpulkan bahwa interaksi adalah salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan *e-learning* (Rostaminezhad dkk., 2013).

Pilihan *platform* dan media yang digunakan adalah teks tersebut mempengaruhi pilihan metode yang diterapkan dalam *e-learning* di PAUD. Karakteristik media mampu mendukung atau sebaliknya membatasi jenis pembelajaran tertentu. Jenis media yang digunakan mensyaratkan strategi, metode, atau pendekatan meningkatkan efektivitas pembelajaran *e-learning* (Swan, 2003).

Berdasarkan jawaban responden, metode yang digunakan pada *e-learning* di PAUD adalah 95% penugasan walaupun dilengkapi dengan metode lainnya seperti percobaan, tanya jawab, curah pendapat, dan diskusi. Temuan senada dilaporkan Kemdikbud bahwa metode yang paling banyak dipilih guru adalah penugasan yaitu sebesar 25% (Kemendikbud, 2020a:12). Hasil survey FSGI dan KPAI juga mengungkap bahwa metode yang paling banyak dipilih adalah memberikan tugas diakukan oleh 58,8% guru. Para guru mengakui bahwa 29% mereka mengakhiri pembelajaran dengan pemberian tugas yang berat (KPAI, 2020a). Survey KPAI juga mengungkap sebesar 73,2% siswa merasa berat mengerjakan tugas, dan 26,8% siswa merasa tidak berat.

Media yang dipilih, *platform* pembelajaran yang diterapkan, dan metode yang dipilih mempengaruhi jenis evaluasi yang digunakan guru PAUD. Responden mengaku 61% guru PAUD menggunakan evaluasi tertulis. Para guru juga mengaku menggunakan evaluasi lebih dari satu dan dilengkapi dengan evaluasi lisan, portfolio, dan produk.

Pilihan media, *platform*, metode, evaluasi, dan interaksi yang rendah saat implementasi *e-learning* berdampak pada perasaan senang dan tidak senang oleh para siswa dalam pembelajaran. Seperti laporan KPAI bahwa 76,7 % siswa merasa tidak senang belajar dari rumah, namun ada 23,3% siswa merasa senang belajar di rumah (CNN Indonesia, 2020). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melaporkan hasil survey Forum Anak Nasional (FAN) bahwa 58% anak merasa tidak senang mengikuti pembelajaran di rumah. Hal ini karena anak sulit berinteraksi dengan teman yang lain (Mashabi, 2020).

Berdasarkan kesiapan para guru, media yang digunakan guru, pilihan *platform* pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan, proses interaksi pembelajaran, alat evaluasi yang digunakan para guru PAUD, serta perasaan para murid maka dapat disimpulkan bahwa implementasi *e-learning* di PAUD kurang efektif.

Kendala-Kendala Implementasi E-Learning di PAUD

Berdasarkan data kualitatif, kendala-kendala yang dialami oleh guru PAUD dalam menerapkan *e-learning* dapat dirangkum pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Kendala Penerapan E-Learning di PAUD

Kategori Kendala	Bentuk Kendala
1. Kendala Pedagogi	Belum mendapatkan pelatihan, belum pengalaman, belum mendapatkan pendampingan, kemampuan TIK rendah, keterbatasan waktu, kurang tepat memilih media, <i>platform</i> , metode, evaluasi, dan rendahnya interaksi pembelajaran, serta kurangnya kedulian orang tua siswa pendampingi anaknya belajar di rumah.
2. Kendala Teknologi	Kurangnya prasarana berupa jaringan internet/wifi, lemahnya sinyal <i>mobile phone</i> , belum dimilikinya perangkat elektronik seperti <i>smartphone</i> , kurangnya kemampuan memanfaatkan perangkat elektronik pintar untuk mendukung <i>e-learning</i> .
3. Kendala Ekonomi	Orang tua siswa kehilangan pekerjaan, penghasilan berkurang, tingkat kemiskinan meningkat, serta harga quota internet dan paket data yang tinggi.

Pengakuan para guru tersebut sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa kendala implementasi *e-learning* yang ditemukan adalah kendala pedagogi dalam menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK (Fauzan dan Pimada, 2018; dan Asiah, 2016), kendala pedagogi dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran-RPP (Sum dan Taran, 2020), kendala pedagogi berupa rendahnya interaksi (Roach dan Lemasters, 2006), kendala pedagogi berupa gangguan mengakses selain materi (Winter dkk., 2010), kendala pedagogi berupa kurangnya kemampuan guru membuat evaluasi (Sari dan Setiawan, 2020), kendala teknologi yaitu ketersediaan akses internet (Harjanto dan Sumunar, 2018; dan Suhartanto, 2010) dan gabungan beberapa kendala (Pangondian dkk., 2019).

Dari analisis implementasi *e-learning* di atas dan belum efektifnya implementasi di sekolah menunjukkan bahwa para guru PAUD masih mengalami kendala pedagogis. Penyebabnya guru belum pernah mendapatkan pelatihan *e-learning*, belum pengalaman menerapkan *e-learning*, dan belum pernah mendapatkan pendampingan secara langsung dalam menerapkan *e-learning*. Kebanyakan guru menerapkan *e-learning* dengan cara belajar secara otodidak.

Kendala pedagogi dalam implementasi terkait kurang profesionalnya guru, alokasi waktu yang kurang, dan ada materi pelajaran tidak dapat terapkan ke dalam aplikasi *e-learning* (Asiah, 2016). Para guru juga menghadapi kendala menerapkan TIK dalam pembelajaran yaitu masalah kurangnya kemampuan guru mengoperasikan perangkat (Fauzan dan Pimada, 2018).

Kendala pedagogi mulai tampak dari belum mampunya guru menyusun RPP untuk *e-learning*, memilih media, memilih metode, memilih alat evaluasi, dan menyelenggarakan pembelajaran dengan interaksi yang optimal. Banyaknya guru PAUD yang terkendala dalam menyusun RPP tidak hanya dialami di Provinsi Jawa Tengah juga masih terjadi di tempat lain. Terutama untuk menyusun RPP yang menyenangkan masih minim (Sum dan Taran, 2020). Pembelajaran *e-learning* tidak mungkin bisa menyenangkan apabila RPP yang disusun tidak menunjukkan interaksi yang menyenangkan.

Kendala pedagogi berupa rendahnya interaksi dan proses pembelajaran ini tidak hanya terjadi di PAUD bahkan tapi juga terjadi di perguruan tinggi. Menurut penelitian *e-learning* di perguruan tinggi juga mengalami kendala interaksi berupa komunikasi tidak tepat waktu, kurang jelasnya harapan atau tujuan pembelajaran, kurang jelasnya tugas yang diberikan bahkan ada kendala keamanan data (Roach dan Lemasters, 2006). Implementasi *e-learning* memiliki sejumlah keuntungan dan kendala. Salah satu kendala terkait pedagogi yaitu dalam mengelola materi pembelajaran dan non-pembelajaran. Ketika siswa sedang belajar dengan *e-learning*, siswa ada yang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tapi ada juga yang membuka informasi lain para perangkat pembelajaran yang sedang dibuka (Winter dkk., 2010).

Kendala pedagogi lainnya yang dialami guru PAUD adalah dalam melaksanakan evaluasi. Penelitian menunjukkan bahwa guru PAUD banyak yang belum mampu melaksanakan penilaian pembelajaran secara berkesinambungan serta tidak bisa membuat penilaian pembelajaran secara sistematis dan menyeluruh (Sari dan Setiawan, 2020). Padahal penelitian itu dilakukan pada proses pembelajaran konvensional, maka bisa dipastikan guru belum memiliki kemampuan penilaian juga dalam menerapkan *e-learning*.

Para guru juga banyak yang mengaku belum bisa menggunakan perangkat elektronik dan *smartphone* untuk mendukung pembelajaran. Artinya kemampuan para guru PAUD di Jawa Tengah dalam menerapkan TIK pada pembelajaran masih kurang. Hal ini berbeda dengan kemampuan guru PAUD di wilayah Jakarta dan Tangerang yang telah memiliki kemampuan TIK dengan cukup baik. Para guru PAUD di dua wilayah tersebut telah mampu memanfaatkan TIK dalam pendidikan dengan cukup baik (Rohita, 2020).

Termasuk kendala pedagogis adalah kemampuan orang tua untuk menggunakan perangkat elektronik dan *gadget* yang dimilikinya untuk mendukung pembelajaran anak di rumah. Hal ini karena kebanyakan masyarakat menggunakan *smartphone* untuk bersosial media. Sementara itu dari pihak-pihak terkait seperti Disdikbud dan Kemenag belum ada panduan bagi orang tua dalam mendampingi anaknya belajar pada masa Covid-19 ini. Akhirnya banyak pengakuan orang tua di berbagai media massa bahwa mereka stres selama mendampingi anaknya belajar di rumah.

Jika orang tua siswa punya perangkat elektronik dan *gadget* ada masalah lain yaitu kepedulian orang tua. Selama masa belajar di rumah faktor keterlibatan orang tua dalam *e-learning* di PAUD mutlak diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi keterlibatan orang tua di PAUD dalam mendidik anak diantaranya faktor status sosial (Irma dkk. 2019). Maka guru perlu tahu status sosial orang tuanya dan mengajak orang tua berpartisipasi lebih aktif mendampingi anak belajar di rumah.

Kendala teknologi yang dialami para guru dan murid atau orang tua murid diantaranya terkait prasarana dan sarana *e-learning*. Kendala prasarana terkait dengan ketersediaan infrastruktur internet dan jaringan *mobile phone*. Sementara itu kendala sarana terkait dengan kepemilikan *smartphone* dialami oleh sebagian orang tua siswa.

Di Indonesia belum ada standar minimum *e-learning* dari pemerintah dan kualitas pemanfaatan situs *e-learning* masih kurang. Sehingga kualitas *e-learning* masih rendah dan penyebabnya adalah infrastruktur dasarnya masih kurang terutama terkait ketersediaan *internet* (Suhartanto, 2010). Penelitian yang lain mengungkap bahwa selain faktor pedagogi, faktor teknologi adalah penentu keberhasilan implementasi *e-learning*. Terdapat tiga dimensi sistem yang mencakup tiga hal yaitu serta kualitas institusi dan layanan, kualitas informasi dan pembelajaran, dan kualitas sistem dan infrastruktur (Pangondian dkk., 2019).

Kendala teknololgi ini juga diakui oleh Kemendikbud yang melaporkan bahwa total satuan pendidikan di Indonesia yaitu sekolah dan madrasah ada 219. 876 buah. Dari jumlah itu yang sudah terjangkau listrik & internet sebanyak 179,097 buah atau (82%), yang tersedia listrik namun tidak tersedia internet sebanyak 33,227 buah atau (15%), serta tidak tersedia listrik dan tidak tersedia internet ada 7,552 (3%). Sehingga total ada 40.779 lembaga atau 18% yang tidak terjangkau internet dan atau listrik (Kemendikbud, 2020a). Itu gambaran keterjangkauan internet sampai di sekolah, padahal pada masa Covid-19 ini posisi guru dan murid tidak di sekolah melainkan di rumah masing-masing. Jika posisi sekolah kebanyakan lebih terjangkau dibanding rumah-rumah penduduk, maka jumlah siswa yang tidak terjangkau internet masih lebih besar dari 20%.

Kondisi tersebut tampaknya berbeda dengan di Cina yang telah sanggup menyediakan infrastruktur pendukung *e-learning* di sekolah dan universitas dengan lebih baik. Sejak beberapa dekade terakhir Pemerintah Cina telah membangun sejumlah proyek nasional untuk menyiapkan infrastruktur *e-learning* di sekolah bahkan membuat proyek sekolah *online* (Wang dkk., 2009).

Sebenarnya tingkat penetrasi internet di Provinsi Jawa Tengah sudah cukup tinggi yaitu 71,4%, artinya 71,4% penduduk di Jawa Tengah sudah terjangkau akses internet. Kondisi di Jawa Tengah masih lebih baik dari rata-rata tingkat penetrasi internet secara nasional yang baru mencapai 64,8% (Association, 2018). Penetrasi internet di Indonesia juga masih lebih baik dari pada tingkat penetrasi internet secara global yang baru menjangkau 60% dari total penduduk global (Ramadhan, 2020).

Pengakuan guru PAUD di Jawa Tengah terkait ketersediaan *smartphone* (apakah milik orang tuanya atau milik siswanya sendiri) masih menjadi kendala karena banyak yang belum memilikinya, dan hal ini perlu dilakukan konfirmasi ulang. Karena kondisi ini jauh berbeda dengan kondisi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di DIY 94% anak PAUD usia TK 4-6 tahun sudah menggunakan *smartphone* (Zaini dan Soenarto, 2019). Salah satu alasan tingginya tingkat penggunaan *smartphone* dan *tablet* di PAUD adalah sebagai sarana pengenalan teknologi informasi dan komunikasi. Namun penelitian ini tidak mengungkapkan apakah menggunakan *smartphone* tersebut juga digunakan sebagai alat pembelajaran atau tidak. Bisa jadi orang tua siswa PAUD di Jawa Tengah telah memiliki *smartphone* tapi bisa digunakan mendukung anaknya dalam pembelajaran. Pada saat masa pandemi Covid-19 ini banyak orang tua yang bekerja di rumah sehingga perangkatnya juga digunakan untuk bekerja. Artinya ini juga kendala ketersediaan perangkat pembelajaran.

Kebanyakan anak PAUD menggunakan *gadget* untuk bermain saja dan bukan untuk pembelajaran (Pebriana, 2017). Padahal perangkat elektronik dan *gadget* dapat dimanfaatkan oleh orang tua untuk mengenalkan pelajaran kepada anak PAUD. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang diajarkan komputer dasar lebih terampil pada pembelajaran (Taufik dkk., 2019). Apa yang bisa diajarkan kepada anak PAUD melalui perangkat elektronik, antara lain mengetik, membuat tabel, menggambar, belajar matematika, dan mengarang cerita (Setyaji dkk., 2015). Penggunaan *gadget* untuk pembelajaran harus memperhitungkan efek negatifnya. Efek negatif *gadget* antara lain sebanyak 40% anak akan mengamuk jika tidak diberikan *gadget*. Walaupun 22% orang tua punya tujuan agar anak pintar dengan diberikan *gadget* namun hanya 1% saja anak pengguna *gadget* mendapatkan prestasi di sekolah (Novianti dan Garzia, 2020).

Hasil survey menunjukkan bahwa 29% penduduk Indonesia belum memiliki *handphone*. Sebesar 28% penduduk memiliki *handphone* biasa artinya tidak bisa untuk mendukung implementasi *e-learning* dan yang memiliki *smartphone* sebesar 42% (Yanuar, 2019). Survey yang dilakukan KPAI menunjukkan sebesar 15,6% siswa tak memiliki peralatan elektronik untuk mendukung *e-learning* (CNN Indonesia, 2020). Kendala kepemilikan perangkat elektronik dalam mendukung *e-learning* ini juga dilaporkan oleh Kemendikbud bahwa sebesar 40,5% siswa dan orang tua siswa mengalami kendala kurangnya fasilitas pendukung pembelajaran berupa *laptop*, gawai, internet, dan listrik (Kemendikbud, 2020a:17-18).

Kendala ketiga adalah kemampuan ekonomi orang tua siswa dan masyarakat secara umum. Dalam situasi pandemi ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau menurun pendapatnya karena dirumahkan sementara waktu. Rendahnya kemampuan ekonomi mengakibatkan mereka tidak sanggup membeli perangkat elektronik, untuk berlangganan *wifi*, atau untuk membeli kuota dan paket data.

Laporan BPS Provinsi Jawa Tengah 2019 sebelum masa Covid-19 jumlah penduduk miskin ada 10,8% setara dengan 3,74 juta orang Jawa Tengah. Dipastikan dampak Covid-19 ini semakin banyak jumlah masyarakat miskin. Mereka besar kemungkinan tidak memiliki *smartphone* atau sulit untuk membeli kuota internet dan paket data untuk mendukung *e-learning*. Masalah ekonomi ini juga ditemukan dalam laporan KPAI bahwa 42,3% siswa mengalami kendala tidak memiliki kuota internet selama belajar di rumah (CNN Indonesia, 2020).

Kemendikbud juga melaporkan bahwa kemampuan ekonomi guru merupakan hambatan *e-learning* ini dialami oleh 20% guru yaitu kurang memadainya jaringan internet/kurangnya kuota (Kemendikbud, 2020a:17-18). Kondisi ini segera direspon oleh Mendikbud dengan mengeluarkan petunjuk teknis BOS reguler tahun 2020 yang diperbaharui (Kemendikbud, 2020b). Disebutkan “pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk membeli paket data, pulsa, atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan peserta didik”. Para kepala satuan pendidikan segera merespon baik dengan merealokasi anggaran belanja sekolah. Kemendikbud melaporkan bahwa alokasi anggaran sekolah terbesar diberikan untuk fasilitas penunjang guru termasuk diantaranya untuk membeli kuota internet mencapai 51%, menyewa sumber belajar daring mencapai 11%, serta membeli fasilitas penunjang siswa mencapai 4% (Kemendikbud, 2020a:9). Kendala keuangan, teknis, dan personel juga ditemukan pada pelatihan calon guru di daerah pedesaan di Indonesia dalam menggunakan TIK untuk *e-learning* (Awaludin, 2016).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga kendala utama dalam implementasi *e-learning* di PAUD yaitu kendala pedagogi, kendala teknologi, dan kendala ekonomi. Kendala pedagogi terkait kemampuan guru dan orang tua siswa untuk menggunakan perangkat elektronik dalam pembelajaran. Kendala teknologi terkait ketersediaan akses internet dan kepemilikan perangkat elektronik dan *gadget* atau gawai. Kendala ekonomi karena merosotnya pendapatan masyarakat akibat Covid-19 sehingga tidak mampu membeli kuota internet atau berlangganan *wifi*.

SIMPULAN

Keefektifan rumusan kebijakan *e-learning* yang dikeluarkan Pemerintah melalui Kemendikbud dan Kemenag disimpulkan sangat efektif baik secara teoretis dan praktis berupa pemahaman para guru. Keefektifan implementasi kebijakan *e-learning* yang dilaksanakan oleh para guru PAUD belum efektif karena belum siapnya para guru menerapkan *e-learning*, pilihan media, *platform*, metode, alat evaluasi, dan rendahnya tingkat interaksi selama proses pembelajaran, serta banyaknya siswa yang merasakan tidak senang. Terdapat tiga kendala utama implementasi *e-learning* di PAUD yaitu pedagogi, teknologi, dan ekonomi. Disarankan kepada para guru PAUD agar *e-learning* bisa diimplementasikan secara efektif maka harus disusun RPP dengan memperhatikan tingkat interaksi yang maksimal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah dan Pengurus PGRI Kabupaten serta Kota yang telah membantu menyebarkan angket sehingga dapat menjangkau guru di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, I. E. dan Seaman, J. 2013. *Changing course: Ten years of tracking online education in the United States*. ERIC. ISBN 0984028838.
- Asiah, N. 2016. Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui E-Learning di SMA Budaya Bandar Lampung. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 6, n. 1, p. 77-101. <http://dx.doi.org/10.22373/jm.v6i1.894>.
- Asilestari, P. 2016. Komputer Interaktif sebagai Media Pengajaran Bahasa Inggris pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2, n. 1, p. 55-62. <http://dx.doi.org/10.22373/jm.v6i1.894>.
- Association, I. I. S. P. 2018. *Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia*.

- Awaludin, A. 2016. Connecting the World: The Utilization of ICT for Rural Teacher Education in Indonesia. *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society*, 3, n. 2, p. 218-226. <http://dx.doi.org/10.15408/tjems.v3i2.4983>.
- Buzzetto-More, N. A. 2007. *Advanced principles of effective e-learning*. Informing Science. ISSN 1932886028.
- Coates, H. 2006. *Student engagement in campus-based and online education: University connections*. Routledge, ISBN 1134161530.
- Fauzan, U. dan Pimada, L. H. 2018. ICT-Based Teaching of English at Madrasah Aliyah in Kalimantan. *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society*, 5, n. 2, p. 193-211. <https://dx.doi.org/10.15408/tjems.v5i2.10414>.
- Harjanto, T. dan Sumunar, D. S. E. W. 2018. Tantangan Dan Peluang Pembelajaran Dalam Jaringan: Studi Kasus Implementas Elok (E-Learning: Open For Knowledge Sharing) Pada Mahasiswa Profesi Ners. *Jurnal Keperawatan Respati Yogyakarta*, 5, p. 24-28..
- Huang, R., Spector, J. M., dan Yang, J. 2019. *Educational Technology: A primer for the 21st century*. Springer. ISBN 978-981-13-6643-7. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-6643-7>.
- Inoue, Y. 2007. Online education for lifelong learning. *IGI Global*. ISSN 1599043211.
- Irma, C. N., Nisa, K. dan Sururiyah, S. K. 2019. Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini di TK Masyithoh 1 Purworejo. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3, n. 1, p. 214-224. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v3i1.152>.
- Johnson, K. dan Manning, S. 2010. *Online education for dummies*. Canada: John Wiley & Sons Publishing. ISBN 0470536209.
- Juwah, C. 2006. *Interactions in online education: Implications for theory and practice*. Routledge. ISBN 1134247494.
- Kemendikbud. 2020a. *Analisis Survey Cepat Pembelajaran Di Rumah Dalam Masa Pencegahan Covid* 19, https://drive.google.com/drive/folders/1cbytwcueszrev_Aynxpiyy1jt8ncsqg1 (Diakses 23 April 2020).
- Kemendikbud. 2020b. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. 2020b.
- Kemendikbud. 2020c. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan.
- Kemendikbud. 2020d. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).
- Kemenag. 2020a. Surat Jendral Pendidikan Agama Islam Kemenag Direktur KSKK Madrasah No, B-686.1/Dj.I/Dt.I.I/Pp.00/03/2020 Tentang Mekanisme Pembelajaran dan Penilaian Madrasah dalam Masa Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- Kemenag. 2020b. <https://madrasah3.kemenag.go.id/elearning/> (Diakses 20 April 2020).
- Kemenag. 2020c. <http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/?Content=Data-Statistik> (diakses 20 April 2020).
- KPAI-Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2020a. *Sebab Siswa Semakin Termarginalkan Saat Belajar Di Rumah*. <https://www.kpai.go.id/berita/sebab-siswa-semakin-termarginalkan-saat-belajar-dari-rumah> (diakses 5 Mei 2020).
- KPAI-Komisi Perlindaungan Anak Indonesia. 2020b. *KPAI-FSGI: 53% Guru Berorientasi Kurikulum Saat Belajar dari Rumah*. <https://www.kpai.go.id/berita/sebab-siswa-semakin-termarginalkan-saat-belajar-dari-rumah> (diakses 5 Mei 2020).
- Lynch, M. M. 2002. *The online educator: A guide to creating the virtual classroom*. Routledge. ISBN 1134542542.
- Madjid, A. 2028. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Samudera Biru.

- Mashabi, S. 2020. "Survei Kemen PPPA: 58 Persen Responden Tak Senang Belajar dari Rumah". <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/11/13511231/survei-kemen-pppa-58-persen-responden-tak-senang-belajar-dari-rumah> diakses 5 Mei 2020.
- Novianti, R. dan Garzia, M. 2020. Penggunaan Gadget Pada Anak; Tantangan Baru Orang Tua Milenial. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4, n. 2. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.490>,
- Nugroho, R. 2017. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. 2014. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. ISBN 9786022292470.
- Palloff, R. M. dan Pratt, K. 2002. *Lessons from the cyberspace classroom: The realities of online teaching*. California: John Wiley & Sons Publishing. ISBN 0787959960.
- Pangondian, R. A., Santosa, P. I. dan Nugroho, E. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Pembelajaran Daring Dalam Revolusi Industri 4.0. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*.
- Panjaitan, N. Q., Yetti, E. dan Nurani, Y. 2020. Pengaruh Media Pembelajaran Digital Animasi dan Kepercayaan Diri terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Anak. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4, n. 2, p. 588-596. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.404>.
- Pebriana, P. H. 2017. Analisis Penggunaan Gadget Terhadap Kemampuan Interaksi Sosial Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1, n. 1, p. 1-11. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v1i1.26>.
- Ramadhan. 2020. Ini Data Pengguna Internet di Seluruh Dunia Tahun 2020, <https://teknoia.com/data-pengguna-internet-dunia-ac03abc7476> diakses 10 April 2020.
- Rayes, A. dan Salam, S. *Internet of things-from hype to reality: the road to digitization*. Switzerland AG 2017: Springer Nature, 2019. ISBN 978-3-319-99516-8.
- Roach, V. dan Lemasters, L. 2006. Satisfaction with online learning: A comparative descriptive study. *Journal of Interactive Online Learning*, 5, n. 3, p. 317-332.
- Rohita, R. 2020. The Ability of Ece Teachers to Use ICT in The Industrial Revolution 4.0. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4, n. 2, p. 502-511. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.339>.
- Rostaminezhad, M., Mozayani, N., Norozi, D., dan Iziy, M. (2013). Factors related to e-learner dropout: Case study of IUST elearning center. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 83, p. 522-527. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.100>.
- Sari, K. M. dan Setiawan, H. 2020. Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Melaksanakan Penilaian Pembelajaran Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4, N. 2, P. 900-912. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.478>,
- Setyaji, A., Iskak, A., Sukmaningrum, R. dan Hawa, F. 2015. Komputer Interaktif Sebagai Media Pengajaran Bahasa Inggris Pada Anak Usia Dini. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6, N. 1, P. 1-12. <http://dx.doi.org/10.26877/e-dimas.v6i1.794>.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, dan Penelitian Evaluasi)*. Bandung: Penerbit Alfabeta. ISBN 9786022893110.
- Suhartanto, H. 2010. Survei 2009: Mutu Situs E-Learning Sekolah Indonesia Masih Sangat Minim. *Jurnal Sistem Informasi*, 6, n. 1, p. 80-83. <https://doi.org/10.21609/jsi.v6i1.280>.
- Sum, T. A. dan Taran, E. G. M. 2020. Kompetensi Pedagogik Guru Paud Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembelajaran. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4, N. 2. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.287>.
- Swan, K. 2003. Learning Effectiveness Online: What The Research Tells Us. *Elements Of Quality Online Education, Practice And Direction*. 4, N. 1, P. 13-47.

- Taufik, A., Apendi, T., Saidi, S. dan Istiarsono, Z. 2019. Parental Perspectives On The Excellence Of Computer Learning Media In Early Childhood Education. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 13, N. 2, P. 356-370. <https://doi.org/10.21009/JPUD.132.11>.
- Tilaar, H. dan Nugroho, R. 2009. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wang, Q., Zhu, Z., Chen, L., dan Yan, H. 2009. E-learning in China. *Campus-Wide Information Systems*, 26, n.2. <https://doi.org/10.1108/10650740910946783>.
- Winter, J., Cotton, D., Gavin, J., dan Yorke, J. D. 2010. Effective E-Learning? Multi-Tasking, Distractions And Boundary Management By Graduate Students In An Online Environment. *Alt-J*, 18, N. 1, P. 71-83. <https://doi.org/10.1080/09687761003657598>.
- Yanuar. 2019. *Survei Kepemilikan Smartphone, Indonesia Peringkat ke-24*. <https://Tekno.Tempo.Co/Read/1181645/Survei-Kepemilikan-Smartphone-Indonesia-Peringkat-Ke-24/Full&View=Ok> Diakses 21 April 2020.
- Zaini, M. dan Soenarto, S. 2019. Persepsi Orangtua Terhadap Hadirnya Era Teknologi Digital Di Kalangan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3, N. 1, P. 254-264. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v3i1.127>.